YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 - 2023

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

MUHAMAD GITO

NPM : 157310285

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Muhamad Gito

NPM : 157310285

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2023

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 08 April 2022

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	**Syaprianto, S.Sos., M.IP**
Turut Menyetujui, Wakil Dekan I	Program Studi Ilmu Pemerintahan Ketua,
Indra Safri., S.Sos., M.Si	**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhamad Gito
NPM : 157310285
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023

Format sistematika dan pembahasan masing masing materi dalam skripsi ini dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmih, oleh karena itu layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam Ujian Komprehensif.

Program Studi Ilmu Pemerintahan — Pekanbaru, Desember 2021

Ketua Prodi	Pembimbing
Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si	**Yendri Nazir, S.Sos.,M.Si**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama	: Muhamad Gito
NPM	: 157310285
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S-1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2023

Naskah skripsi ini telah secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karna itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 08 April 2022

Ketua

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris

Syaprianto, S.Sos., M.IP

Anggota

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri., S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0169 /UIR-FS/KPTS/2022
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Gito
N P M : 157310285
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi : **Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023.**

Struktur Tim :
1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. — Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Syaprianto, S.Sos., M.IP — Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Risky Setiawan, S.IP., M.Si. — Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si. — Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Januari 2022
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p --------sk.penguji---------

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor:0169 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 13.00 – 1400 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a	:	Muhammad Gito
NPM	:	157310285
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	**Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023.**
Nilai Ujian	:	Angka : " 76,6 " ; Huruf : " B1 "
Keputusan Hasil Ujian	:	**Lulus** / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji	:	

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si,	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2.
3.	Risky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.		

Pekanbaru, 31 Januari 2022
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **"**Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023**".** Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak - pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta do'a yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Ahmad Latief, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan juga asisten Dosen yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada keluarga tercinta, yaitu Ayah dan Ibu dan Abang saya tercinta dan juga kepada seluruh saudara-saudara saya yang senantiasa mendo'akan agar penulis bisa selalu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.
7. Kepada Bapak Kepala Desa Pandau Jaya dan Perangkat Desa serta semua pihak yang ada di Desa Pandau Jaya yang selalu memberikan ruang keapada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada sahabat, teman dan rekan-rekan yang selalu membantu penulis dalam memahami ilmu serta membantu penulis untuk lebih bersemangat dalam menyelesaikan penelitian ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka dengan imbalan pahala berlipat ganda Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat keridhaan Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ….

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, Desember 2021

Muhamad Gito

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING……... i

KATA PENGANTAR…… ii

DAFTAR ISI……... v

DAFTAR TABEL……. viii

DAFTAR GAMBAR……. ix

DAFTAR LAMPIRAN…….. x

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH …… .xi

ABSTRAK……..

ABSTRACT……

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…..... 1

B. Perumusan Masalah …..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …..... 9

1. Tujuan Penelitian …..... 9

2. Kegunaan Penelitian …..... 9

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan …..... 10

1. Pemerintahan …..... 10

2. Kebijakan …..... 15

3. Perumusan (Formulasi) Kebijakan …..... 18

4. Program Kerja …..... 19

5. Evaluasi …..... 20

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pembangunan …. 23
7. Pemerintah Desa …. 24
8. Otonomi Desa …. 25
B. Kerangka Pikiran …. 26
C. Konsep Operasional …. 27
D. Operasional Variabel …. 29

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian …… 33
B. Lokasi Penelitian …. 33
C. Informan Penelitian …. 34
D. Instrumen Penelitian …. 37
E. Jenis dan Sumber Data …. 39
F. Teknik Pengumpulan Data …. 39
G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian …. 40

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Pandau Jaya …. 42
B. Letak Geografis ……... 44
C. Keadaan Demografis ……... 45
D. Pemerintah Desa …… 49

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan Dan Informan…….. 56
1. Identitas Informan Berdasarkan Umur…… 56
2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan…….. 57

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin…….. 58

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan…….. 59

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan …… 89

B. Saran ……..… 90

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Operasinal Variabel 30

Table I.2 Susunan Informan Penelitian 35

Tabel II. 1 Jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023..... 40

Table III.1 Sejarah Perkembangan Desa 43

Table III.2 Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin 45

Tabel III.3 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Pandau Jaya 46

Tabel III.4 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pandau Jaya 47

Tabel III.5 Jenis Agama Masyarakat Desa pandau Jaya 48

Tabel III.6 Fasilitas Pendidikan Desa Pandau Jaya 48

Tabel III.7 Jumlah BPD Desa Pandau Jaya 53

Tabel IV.1 Identitas Responden Dilihat Dari Umur 57

Tabel IV.2 Identitas Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 58

Tabel IV.3 Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin 59

Tabel IV.4 Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) Tahun 2017-2023 65

DAFAR GAMBAR

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar I.1 Model Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 26

Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandau Jaya …….. 53

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN **HALAMAN**

I : Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Nomor : 08/PEM/PJ/I/2018 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2017-2023

II :Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar Dan Provinsi Riau Yang Masuk Ke Desa

III : Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

IV : Peraturan Desa pandau Jaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2023

V : Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya 2017-2023

VI : Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan BPD

VII : Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Gito

NPM : 157310285

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi : Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya mengatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penuli karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah dietapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya mengatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021



Muhamad Gito

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUASI PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 - 2023

Oleh :

Muhamad Gito

ABSTRAK

Kata Kunci: Evaluasi, Penyusunan, Perencanaan, Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan dan dijadikan dasar dalam menyusun RKP Desa dan APB Desa, untuk itu harus disusun secara baik. Penelitian ini bertjuan untuk mengevaluasi penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2021 dan mengetahui faktor penghambat dalam penyusunan tersebut. Indikator evaluasi yang dipergunakan meliputi pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, pengkajiaan keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penetapan RPJM Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan memperioritaskan wawancara sebagai alat pengumpulan data utama dan dikuatkan dengan observasi serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti.Yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Pandau Jaya, dan informannya adalah Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data (pengelompokan), penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2023 masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya adalah tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan oelh Pemerintah Kabupaten Kampar, kurang tersedianya sarana dan prasarana untuk menyusun RPJM Desa, tidak adanya pendampingan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, dan terbatasnya waktu yang dimiliki oleh tim untuk bisa mengerjakan RPJM Desa. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pendidikan dan pelatihan penyusunan RPJM Desa dan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, serta Kepala Desa dalam mengangkat tim harus mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan waktu dari yang akan diangkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

EVALUATION OF THE PREPARATION OF MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN PANDAU JAYA VILLAGE, SIAK HULU DISTRICT, KAMPAR REGENCY, 2017 - 2023

By :

Muhammad Gito

ABSTRACT

Keywords: Evaluation, Preparation, Planning, Development

The Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) is a planning document for a 6 (six) year period and is used as the basis for preparing the Village RKP and Village Budget, for this reason it must be prepared properly. This study aims to evaluate the preparation of the RPJM for Pandau Jaya Village in 2017-2021 and find out the inhibiting factors in the preparation. The evaluation indicators used include the formation of the Village RPJM drafting team, alignment of district development policy directions, assessment of village conditions, preparation of village development plans through village deliberation, drafting of the Village RPJM, and determination of the Village RPJM. The research method used is a qualitative method, by prioritizing interviews as the main data collection tool and strengthened by observation and documentation. The data collected is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at the location studied. The key informant in this study was the Pandau Jaya Village Head, and the informant was the RPJM Drafting Team of Pandau Jaya Village. The type of data used consists of primary data collected using interview techniques, and secondary data collected using observation and documentation techniques. While the data analysis techniques used are data collection, data reduction (grouping), data presentation, conclusion drawing and verification. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that in the Preparation of the Medium-Term Development Plan of Pandau Jaya Village for 2017-2023 there were still some that were not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. The inhibiting factors in the preparation of the Pandau Jaya Village RPJM are the absence of education and training provided by the Kampar Regency Government, the lack of available facilities and infrastructure to prepare the Village RPJM, the absence of assistance from the Kampar Regency Regional Government, and the limited time the team has to be able to working on the Village RPJM. Recommendations that need to be considered, especially with regard to education and training in the preparation of the Village RPJM and assistance from the Kampar District Government, as well as the Village Head in appointing a team must consider the capabilities and availability of time from those who will be appointed.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

desa. Perencanaan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Pandau Jaya ini merupakan rencana strategis Desa Pandau Jaya untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti patisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Otonomi desa hadir memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak taradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sebagai konsekwensi dari dicabutnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan peluang kepada desa untuk lebih mempunyai peran dalam pembangunan desa. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut dikatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada pasal 1 angka 3 dikatakan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi landasan dalam penyelengagaraan pemerintahan desa, dan desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifis pemerintahan dan pembangunan. Desa memegang peran penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 78 ayat 1 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan landasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program – program desa yang disertai dengan rencana desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Pembangunan desa merupakan implementasi akhir dari perencanaan pembangunan nasional. Sistem pembangunan yang telah digulirkan oleh pemerintah selama ini masih belum optimal ditinjau dari kebutuhan masyarakat desa secara prioritas, sehingga untuk mencapai pembangunan nasional secara berkesinambungan dan benar-benar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Kemudian kehadiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa diharapkan memberikan pedoman bagi setiap desa yang ada di Negara Republik Indonesia dalam membuat rencana pembangunan kedepan. Arti penting Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu untuk menciptakan pembangunan desa yang berjalan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terencana dan terstruktur dengan baik seperti yang diharapkan oleh Negara Republik Indonesia. Pada pasal 7 ayat 3 dikatakan penyusunan RPJM Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.
b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
c. Pengkajian keadaan Desa.
d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
e. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
g. Penetapan RPJM Desa.

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro.

Perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan aset desa. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan aset dan nilai serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan pihak luar.

Dalam menyusun RPJM Desa harus mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, karena dalam Permendagri tersebut dijelaskan secara lengkap mekanisme dan tahapan penyusunan RPJM Desa. Dengan mempedomani Permendagri di harapkan desa akan mempunyai RPJM Desa yang baik, karena RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah satu-satunya dokumen perencanaan yang ada di desa.

Desa Pandau Jaya adalah salah satu desa dari 12 desa yang ada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang terbentuk pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk 32.354 penduduk jiwa. Desan Pandau Jaya memiliki 5 Dusun antara lain :

1. Dusun I Pandau Makmur
2. Dusun II Pandau Permai
3. Dusun III Bencah Limbat
4. Dusun IV Gading Marpoyan
5. Dusun V Sei Tangon

Batas Wilayah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

-Sebelah Utara : Berbatas dengan JL.Raya Pasir Putih

-Sebelah selatan : Berbatas dengan Sei-Tangon

-Sebelah Barat : Berbatas dengan Sungai Sialang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

-Sebelah Timur : Berbatas dengan Desa Baru

Kecenderungan selama ini perencanaan pembangunan di desa belum berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan hal itu jugalah yang terjadi dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Berkaitan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan dasar peraturan erundang - undangan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sehingga proses penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam peraturan tersebut.

Meskipun Desa Pandau Jaya telah melaksanakan penyusunan RPJM Desa, namun masih ada beberapa fenomena yang dijumpai, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh tim penyusun, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa yaitu :

1. Dalam melakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023 tim tidak bisa melakukan penyelarasan dengan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar, karena pada saat dilakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya belum adanya rencana strategis dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang dibutuhkan oleh tim penyusun RPJM Desa. Padahal dalam pasal 10 ayat 4 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dijelaskan bahwa tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan dengan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pada saat melakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya juga tidak bisa diselaraskan dengan rencana umum dan rencana rinci dari tata ruang wilayah kabupaten Kampar, karena Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019. Sehingga ini juga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 ayat 4 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakuakan penelitian yang dijadikan skripsi dengan judul "Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2023".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017 - 2023 dan apa faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa tersebut ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Tujuan dan Kagunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengevaluasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan Ilmu Pemerintahan.

b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah Desa Pandau Jaya dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Sebagai bahan referensi dan bahan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Berangkat dari permasalahan diatas, untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan pnelitian ini. Hal ini dimaksud memudahkan penulis dalam melakukan peneitian dan menjadi landasan dalam penelitian ini, teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian yang akan dihubungkan dengan permasalahan penelitian ini.

1. Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:7) Ilmu Pemeintah dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Masih Ndraha (2011:364). Ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari semua aspek pemenuhan kebutuhan dalam hubungan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan itu terlihat melalui berbagai kegiatan, peristiwa, kejadian, atau keadaan.

Menurut Syafiie (2011:8) Ilmu Peemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurus (eksekitif), pengaturan (legslatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gajala pemerintahan secara baik dan benar.

Masih menurut Syafiie (2011:8) Ilmu pemerintahanadalah ilmu yang mempelajari bagaimanaa melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif,eksekutif,dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan diperintah.

Selanjutnya menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan Ilmu Pemerintah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan oranglain secara tidak sah.

Labolo (2011:2) mengatakan ilmu pemerintahan mengkontruksikan dirinya sebagai sebuah ilmu yang berasal dari manusia dan kembali kepada manusia dalam relasi yang memerintah dan diperintah.

Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendifinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu mempelajari proses politik (alokasi otoriatif nilai-nilai didalam sebuah masyarakat)dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara.

Menurut Budiarjo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memilikin tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ndraha (2011:364) pemerintahan adalah proses pemenuhan (penyediaan) kebutuhan pihak yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil kepada setiat orang pada saat diperlukan. Jadi pemerintahan selalu menyangkut dua belah pihan,pemerintahan(dengan kekuasaannya) deangan yang diperintah(dengan tuntunannya). Lembaga yang didesain khusus dan berkewajiban memenuhi kebutuhan yang dimaksud disebut pemerintah (unit kerja publik).

Syafiie (2010:38) menjelaskan pemerintahan sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.

Menurut Ndraha (dalam Azam 2011:8) pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah.

Masih Ndraha (2011:5) mengatakan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil, sedangkan pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Labolo (2011:20) pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga Negara.

Sedangkan menurut Rasyid (dalam Labolo 2011:19) Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Finer (dalam Labolo 2011:16) mengatakan pemerintah yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Kemudian Budiardjo (2009:53) mengatakan setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Keputusan-Keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Keputusan-Keputusan ini antara lain berbentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lain, dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama Negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Menurut Surbakti (1992:168), istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau ditinjau dari tiga aspek yaitu:

a. Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara.

b. Ditinjau dari aspek struktural fungsional, pemerintahan mengandung arti seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan Negara.

c. Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2000: 78-79) Pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu:

a. Fungsi primer atau disebut dengan fungsi pelayanan yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivasitisasikan termasuk jasa hamkam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.

b. Fungsi sekunder atau disebut juga fungsi pemberdayaan yaitu sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan, pembangunan dan prasarana.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi tiga fungsi yaitu:

a. Fungsi pembangunan
b. Fungsi pemberdayaan
c. Fungsi pelayanan

Namun didalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

2. Kebijakan

Ndraha menjelaskan (2003:492-499) kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat.

Menurut pendapat Friedrich (dalam Wibawa 2011:2) kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kaloh (2007:260) mendefinisikan kebijakan sebagai wewenang pembuatan keputusan.

Budiardjo (2008:20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Ndraha (2011:498) mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai pilihan terbaik usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Sitepu (2012:7) kebijakan publik adalah produk yang memperjuangkan kepentingan publik yang filosofinya dalah mensyaratkan perlibatan publik sejak awal sampai akhir.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Menurut Nugroho (2004:100) kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Masih Nugroho (2004) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua maslah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat didaerah.

Anderson dalam Wahab (2001:3) merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Abidin, (2004:56), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

a. Efektifitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat mengahsilkan tujuan akhir yang diinginkan.

b. Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

c. Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.

Masih menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

3. Perumusan (Formulasi) Kebijakan

Menurut Dunn (2000:132) perumusan kebijakan (policy formulation) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah.

Tjokroamidjojo dalam islamy (2000:24) menyebutkan perumusan kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan.

Kemudian menurut Islamy dalam buku prinsip-prinsip kebijaksanaan negara (2000:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Masalah
2. Agenda Kebijakan
3. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan masalah
4. Tahap Penetapan Kebijakan

4. Program Kerja

Menurut Johara T. Jaya menyatakan program kerja adalah suatu proses yang diorganisasi dan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama.

Sedangkan menurut Husein Umar menyatakan program kerja merupakan kegiatan atau proses membuat rencana yang kelak dipakai perusahaan dalam rangka melaksanakan pencapaian tujuannya. Selanjutnya alasan mengapa program kerja menjadi sesuatu yang penting dan harus disusun, yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Lebih Efisien

Dengan adanya program kerja maka kegiatan yang dilakukan tidak terlalu banyak sehingga waktu selama kepengurusan waktu lainnya bisa dipakai untuk merealisasikan program lainnya yang sudah dibuat.

2. Lebih Efektif

Dengan adanya program kerja maka semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat disinkomkan dengan unit atau definisi kepengurusan yang satu dengan yang lainnya.

5. Evaluasi

Menurut Nurcholis (2007 ; 274) Evaluasi Kebijakan adalah Penilaian secara menyeluruh input, proses, outputs dan outcomes dari kebijakan Pemerintah .

Menurut Finance (1994:4 dalam Badjuri dan Yuwono; 2002:135) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 tipe evaluasi:

a. Evalusi kecocokan. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang ditetapkan tersebut memang cocok untuk dipertahankan, perlukah diganti dengan kebijakan lain, dan apakah kebijakan ini cocok dilakukan oleh pemerintah daerah bukan oleh swasta;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Evaluai efektifitas. Yaitu melakukan penilaian apakah kebijakan yang dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya;

c. Evaluasi efesiensi. Yaitu melakukan penelitian berdasarkan tolak ukur enkonomis yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan. Atau dengan kata lain apakah input yang digunanakan sebanding dengan output yang diharapkan. Dan apakah cukup efesien penggunaan keuangan publik dan sumber daya dalam yang mencapai dampak kebijakan;

d. Evalusi meta. Yaitu melakukan penilaian terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan lembaga berwenang sudah profesional? Apakah evaluasi dilakukan tersebut sensitive terhadap kondisi social, kultural. Dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang memengaruhi pilihan-pilihan manajerial?

Ndraha (2003:202) mengatakan bahwa evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut :

1. Model before-after, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment) tolak ukurnya adalah before.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Model das sollen-dassein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukurnya adalah das sollen.

3. Model kelompok kontrol-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan), tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Wibawa (dalam Nugroho, 2004:186) evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

4. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Pembangunan

Menurut Ginanjar Kartasasmita (2007:13) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Rogers (2007:15) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan, dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Inayatullah (2007:21) pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Shoemaker (2007:24) mengungkapkan pengertian pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kleinjans (2007) mendefinisikan pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri.

Deddy T. Tikson (2005:41) menjelaskan bahwa pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004) mengatakan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Menurut Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation building)*.

7. Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemimpin Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, yang bertugas seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Sumber Saparin (1986:71) menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. pemerintah Desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.

8. Otonomi Desa

Menurut Widjaja (2011:165) menjelaskan bahwa Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Menurut Kartohardikoesmo dalam Surianingrat (1992:140) Otonomi Desa adalah hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak hanya kepentingan perorangan tetapi juga kepentingan masyarakatnya.

Pengakuan Otonomi di Desa, Talizindhu Ndraha (2010:12) menjelaskan sebagai berikut:

a. Otonomi Desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh Pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada "kemurahan hati" Pemerintah dapat semakin berkurang.

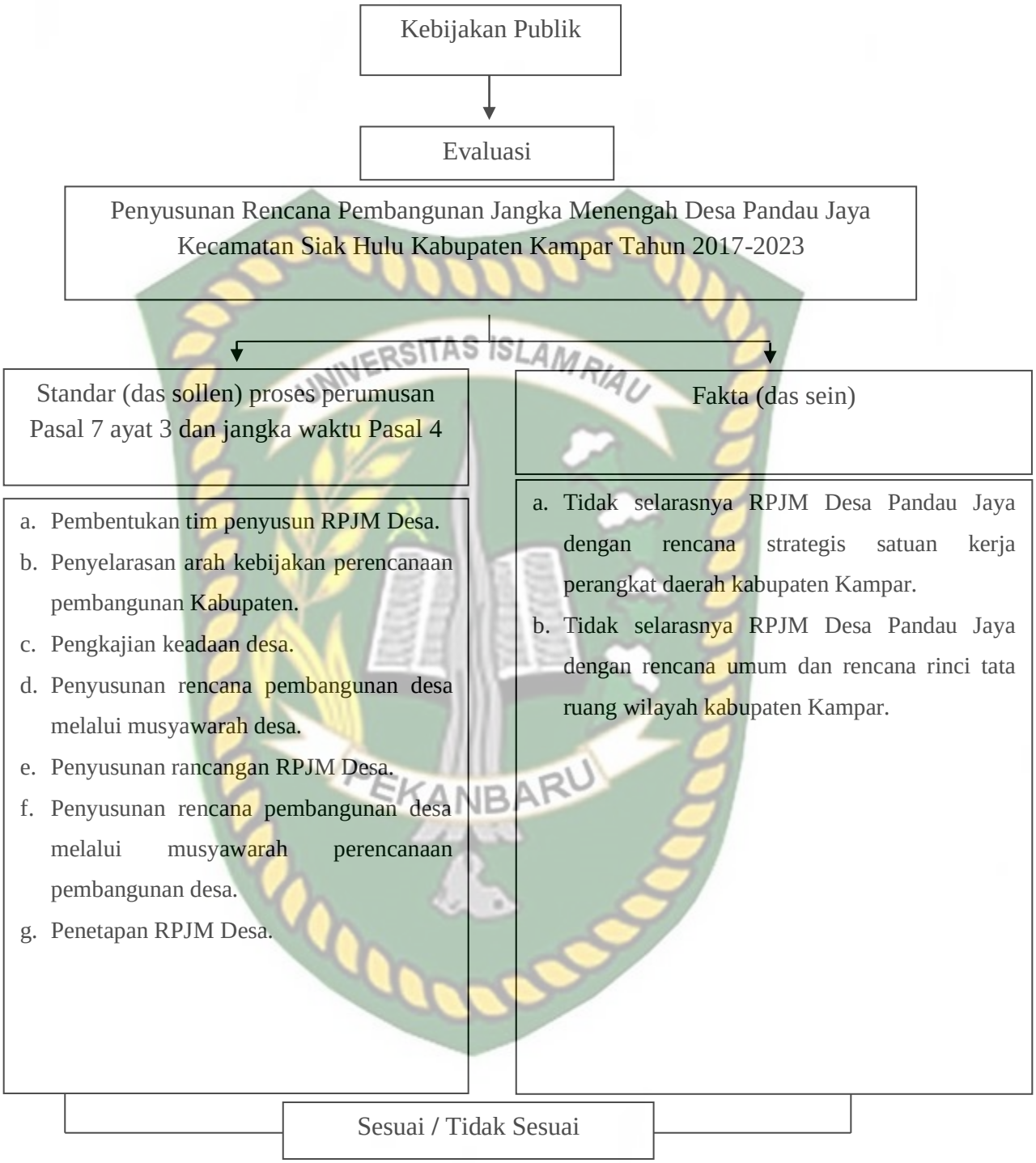
b. Posisi dan peran Pemerintahan Desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran tentang Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023.

Gambar I. 1. : Model Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



C. Konsep Operasional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk mempermudah dalam penganalisaan dan menghindari kesalahan dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan variabel, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan ini. Untuk kesamaan terhadap keseluruhan seluruh isi dari tulisan ini maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu adalah:

1. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa Pandau Jaya.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pandau Jaya.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pandau Jaya.
5. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pandau Jaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan, melalui urutan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di desa Pandau Jaya dalam rangka mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, adil dan makmur.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah dokumen perencanaan Desa Pandau Jaya untuk periode enam (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen rencana kerja tahunan Desa Pandau Jaya yang berfungsi sebagai bahan utama dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa tahunan.
9. Evaluasi yang dimaksud adalah penilaian terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.
10. Evaluasi yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat atau sasaran dari RPJM Desa Pandau Jaya.
11. Penyusunan yang dimaksud adalah proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

D. Operasional Variabel

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I. I: Operasional Variabel

Konsep	Variable	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang sudah mantap menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan negara (Sumaryadi, 2005:15).	Evaluasi Penyusunan perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023	a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.	a. Kepala Desa selaku pembina. b. Sekretaris Desa selaku ketua. c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris. d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. e. Jumlah tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang. f. Tim penyusun mengikutsertakan perempuan. g. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
		b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.	a. Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten/Kota. b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota. d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
		c. Pengkajian keadaan desa.	a. Penyelarasan data desa. b. Penggalian gagasan masyarakat. c. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
		d. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.	a. Laporan hasil pengkajian keadaan desa. b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa. c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. d. Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
		e. Penyusunan rancangan RPJM Desa.	a. Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. b. Berita acara disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala desa.
		f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.	a. Kepala Desa menyelenggarakan. musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. b. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Unsur Masyarakat.
		g. Penetapan RPJM Desa	a. Kepala desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4
			b. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. c. Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. d. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
			Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulisan dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh hasil evaluasi terhadap masalah (Sugiyono, 2012:80). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu menjelaskan hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan key informan dan informa serta berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi dilapangan. Dengan metode ini diharapkan penulis memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, karena desa ini adalah desa yang heterogen penduduknya, baik dari agama, suku, budaya, adat istadat dan memiliki penduduk 34.288 jiwa. Selain itu Desa Pandau Jaya juga memiliki sumber daya manusia yang bagus, yang diharapkan akan memberikan kontribusi untuk kemajuan desa ini, terutama dalam membuat perencanaan pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Informan penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevensi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Menurut Bungin (2009:108) informan adalah orang yang diwawancarai atau diminta informasi oleh para pewancara, artinya orang yang dianggap menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.

Adapun teknik penunjukan informan adalah dengan menggunankan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan bahwa sampel yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah ditetapkan dianggap sudah mewakili untuk memberikan jawaban penelitian.

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, dan iformannya dari Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yaitu , Sekretaris Desa, Ketua LPM, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Tokoh Kesehatan, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.2: Susunan Informasi Penelitian

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	Firdaus Roza	60	SLTA	Pembina (Kepala Desa)
2	M. Yani Yahya	60	SLTA	Ketua (Sekdes)
3	Zulkifli	48	SLTA	Sekretaris (Ketua LPM)
4	Ir. Nuraini	55	S.1	Anggota (Perangkat Desa)
5	Munir, S. Kom	34	S.1	Anggota (Perangkat Desa)
6	Safrul Rajab, SE, MM	56	S.2	Anggota (Tokoh masyarakat)
7	Yendri Nazir, S.Sos, M.IP	51	S.2	Anggota (Tokoh Masyarakat)
8	Moh. Hujani, Spd	50	S.1	Anggota (Tokoh Pendidikan)
9	Haryanto	50	S.1	Anggota (Tokoh Kesehatan)
10	Dasmiarni	48	SLTA	Anggota (Tokoh Perempuan)
11	Benny Malindo	42	S.1	Anggota (Tokoh Pemuda)
12	Kasman Simaura	53	S.2	Ketua BPD

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Selaras dengan pertimbangan penggunaan teknik purposive sampling tersebut, maka Sugiyono (2012:53-54) mengatakan bahwa teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Dengan demikian yang menjadi informan kunci (key informan) adalah Kepala Desa Pandau Jaya dengan pertimbangan bahwa pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di bentuk oleh Kepala Desa, sehingga diharapkan Kepala Desa Pandau Jaya dapat memberikan informasi yang lebih akurat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017-2023 di Desa Pandau Jaya. Sedangkan pertimbangan untuk Ketua tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Tokoh masyarakat sebagaimana yang telah penulis ungkapkan diatas yaitu dalam evaluasi dilapangan Ketua tim penyusun dan Tokoh masyarakat terlibat langsung sehingga diharapkan dapat memberikan informasi secara aktual tentang kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan jumlah informan dalam penelitian ini akan bertambah sesuai dengan perkembangan selama masa penelitian berlangsung, karena informan yang ditetapkan sekarang masih bersifat sementara. Hal ini disebabkan karena penulis akan menyesuaikan petunjuk yang didapatkan dari para informan yang telah diwawancarai sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Oleh karena itu, siapa yang menjadi informan, dan berapa jumlahnya baru dapat diketahui setelah penelitian ini selesai.

Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Licoln dan Guba dalam Sugioyono (2012:54) bahwa ciri-ciri khusus teknik purposive sampling adalah:

1. Emergent sampling design: bersifat sementara, sebagai pedoman awal terjun kelapangan, setelah sampai kelapangan boleh saja berubah sesuai dengan keadaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Serial selection of sample units: menggelinding seperti bola salju (snow ball), sesuai dengan petunjuk yang didapatkan dari informan-informan yang telah diwawancarai.

3. Continuous adjustment or focusing of the sample: siapa yang akan dikejar sebagai informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Unit informan yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.

4. Selection to the point of redundancy: pengembangan informan dilakukan terus sampai informan mengarah ketitik jenuh.

D. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, peneliti sebagai instrumen juga harus divadilasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan key instrument. Lebih lanjut Licoln dan Gubah dalam Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa:

"The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other form of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument ghas been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

that is grounded in the data that the human instrument has product". Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya :

"pilihan instrumen dalam penelitian naturalistik adalah manusia. Kita akan melihat bahwa bentuk lain dari instrumenasi dapat digunakan pada tahap selanjutnya dari penelitian. Tetapi manusia adalah yang utama dan melanjutkan andalan. Tetapi jika manusia telah menggunakan instrumen secara luas dalam tahap awal penelitian, sehingga instrumen dapat dibangun yang didasarkan pada data bahwa manusia memiliki produk instrumen".

Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2012:60) mengatakan bahwa:

"Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadi manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya".

Selain penulis sendiri yang menjadi instrumen pertama dalam penelitian ini, instrumen pendukung lainnya juga digunakan yaitu berupa pedoman wawancara yang akan dilakukan terhadap informan penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang representatif akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian langsung dilapangan, yaitu dengan melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung dengan responden penelitian guna mendapatkan tanggapan responden terhadap masalah penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017-2023 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Interview (wawancara) yaitu melakukan tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada objek wawancara berkenaan dengan permasalahan yang ada. Penulis menggunakan langsung teknik wawancara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

agar dapat berkomunikasi langsung dengan mewancarai objek yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkompeten terkait fenomena yang dianggap terjadi karena langsung dari sumber terpecaya.

2. Teknik observasi yaitu aktifias terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Penulis memilih teknik ini karena penulis ingin melihat fakta yang terjadi dilapangan sehingga penulis mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
3. Teknik Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen, baik berupa gambar maupun dalam bentuk lainnya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung kelapangan.

G. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal kegiatan penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel II. 1: Jadwal waktu penelitian tentang Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Agts 2021				Sep 2021				Okt 2021				Nov 2021				Des 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP dan Bimbingan																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Pertanyaan Wawancara																				
5	Rekomendasi Survay																				
6	Survay Lapangan																				
7	Analisi Data																				
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Konfereh ensif Skripsi																				
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
12	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																				

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Pandau Jaya terbentuk pada tahun 2000 atas usulan dan desakan masyarakat yang pada saat itu masih termasuk wilayah Desa Baru/RK I, Desa baru yang saat itu terdiri 4 (empat) RK, yaitu:

1. RK I Desa Baru.
2. RK II Desa Pasir Putih.
3. RK III Desa Tanah Merah.
4. RK IV Desa Bencah Limbat.

Pada bulan Maret tahun 2000 atas usulan dan desakan masyarakat maka di mekarkan RK I Desa Baru menjadi 3, yaitu:

1. Desa Baru.
2. Desa Pandau Jaya.
3. Desa Tanah Merah.

Sebagai PJS Desa Pandau Jaya oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di tunjukan Bapak H. Syafaruddin hingga tahun 2004. Nama Desa Pandau Jaya diambil dari salah satu Developer Puskopkar Pandau Permai.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada tahun 2004 diadakan pemilihan Kepala Desa Pandau Jaya yang pertama pemilihannya dilakukan secara langsung yang diikuti oleh 3 orang Calon Kepala Desa, yaitu Bapak H. Jalil Jamil , Alfian, SH, dan H. Syafaruddin. Pada pemilihan tersebut Bapak H. Syafaruddin mendapat suara terbanyak dan pada tahun 004 terpilihla Kepala Desa Pandau Jaya yang masa kepemimpinan beliau dari tahun 2004-2010.

Tabel III. 1 : Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya.

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
2000-2004	Terbentuknya Desa Pandau Jaya yang pertama kali dipimpin Kepala Desa pertama yang bernama Bapak H. Syafaruddin sebagai PJS sampai tahun 2004.	
2004-2010	Pada tahun 2004 diadakan pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) calon Kepala Desa yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak H. Syafaruddin yang masa jabatannya 2004-2010.	
2010-2016	Pada tahun 2010 dimana berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya, maka diadakan pemilihan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak H. Marwas sebagai Kepala Desa Pandau Jaya 2010-2016.	Dari tahun ketahun jumlah penduduk Desa Pandau Jaya semakin padat, namun saat ini disemua sekolah baik SD, SMP, SMA kurang ruang kelas/belajar yang akhirnya proses balajar mengajar kurang optimal, penata pajak yang kurang baik sehingga jumlah jumlah wajib pajak tidak terlaksana laebih

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		kurang 20% dikarenakan kurang koordinasi dengan pemerintahan desa.
2016-2017	Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya maka diadakan pemilihan Kepala Desa bergelombang di Kabupaten Kampar maka terjadi kekosongan Kepala Desa yang detinitif maka Dinas PMD Kabupaten menunjuk PJ Kepala Desa yaitu: 1. Bapak Ali Iskandar, S. Sos, 2. Bapak Harianto,SKM, 3. Bapak Sarifuddin,SPD. Sampai diadakan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang Se Kabupaten Kampar yaitu tanggal 19 november 2017.	Dalam hal pembangunan desa hingga saat ini fasum perumahan Puskopkar belum jelas statusnya.
2017-2023	Pada 19 November 2017 dengan berakhir masa jabatan PJ Kepala Desa diadakan pemilihan yang diikuti 3 orang kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Firdaus ROZA.	

Sumber : RPJM Desa Pandau Jaya, 2021

B. Letak Geografis

Desa pandau jaya memiliki luas 14.274 Ha yang termasuk dalam wilayah Kecamatak Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Pasir Putih

b. Sebalah Selatan berbatasan dengan Sungai Tangon

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sialang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Baru

Sedangkan untuk orbitasi atau jarak pusat pemerintahan desa ke-kecamatan adalah 16 KM, dan jarak pusat pemerintahan desa ke-kabupaten adalah 46 KM. semenjara itu jarak pusat pemerintahan desa ke-Ibu kota Negara adalah 2500 KM.

C. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk yang berdomisili di Desa Pandau Jaya sebanyak 34.288 jiwa berdasarkan jenis kelamin dengan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 9.035 Kepala Keluarga. Maka dapat dikatakan Desa Pandau Jaya termasuk Desa yang berkembang dikarenakan setiap tahunnya ada para pendatang yang menetap di Desa Pandau Jaya.

Untuk lebih jelas lagi mengenai keadaan jumlah penduduk di Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada table berikut;

Tabel III . 2: Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Jenis Kelamin

a. Jumlah laki laki	16.831 Orang
b. Jumlah Perempuan	17.457 Orang
c. Jumlah Total (a+b)	34.288 Orang
e. Jumlah Kepala Keluarga	9.035 Kepala Keluarga
f. Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa)	227 per km

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Sosial Budaya Pendidkan

Secara umum tingkat pendidikan masyarakat Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel III. 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pandau Jaya

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1. Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	760	844
2. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ playgroup	351	393
3. Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4. Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	520	587
5. Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	26	28
7. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	130	122
8. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	361	419
9. Tamat SD / sederajat	1703	1822
10.Tamat SMP / sederajat 11.Tamat Sma / sederajat	1028	1063
12.Tamat D-1 / sederajat	124	203
13.Tamat D-2 / sederajat	25	37
14.Tamat D-3 / sederajat	2430	2482
15.Tamat S-1 / sederajat	128	131
16.Tamat S-2 / sederajat	15	12
17.Tamat S-3 / sederajat	5	3
18.Tamat SLB A	0	0
19.Tamat SLB B	0	0
Tingkat pendidikan	**Laki- laki**	**Perempuan**
20.Tamat SLB C	0	0

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jumlah	**10.224**	**10.880**
Jumlah Total	**21.112**	

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

2. Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan masyarakat Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel III. 4: Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Pandau Jaya

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	226	200
2	Bunuh Tani	125	150
3	Buruh Migrani Perempuan	0	0
4	Buruh Migrant laki-laki	0	0
5	Pegawai Negeri Sipil	536	537
6	Pengrajin Industri Rumah Tangga	0	15
7	Pedagan Keliling	25	15
8	Peternak	270	28
9	Dokter Swasta	3	4
1o	Bidan Swasta	0	202
11	Pensiunan TNI/POLRI	107	93
Jumlah		**1.292**	**1.244**
Jumlah Total Penduduk…..orang		**2.536**	

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Agama

Tabel III. 5: Jenis Agama Masyarakat Desa Pandau Jaya

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	12.789	14.208
2	Kristen	2.976	3.459
3	Katholik	135	152
4	Hindu	104	110
5	Budha	78	98
6	Khonghucu	83	96
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	0	0
8	Aliran Kepercayaan lainnya	0	0
Jumlah		**16.165**	**18.123**

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

4. Fasilitas Pendidikan

Tabel III. 6: Fasilitas Pendidikan Desa Pandau Jaya

Lembaga Pendidikan		
No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	Gedung TK / PAUD	29
2	SD / MI	7
3	SLTP / MTS	2
4	SLTA / MA / MK	2
5	Lain-lain	2
Jumlah		**42**

Sumber : Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa. Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Pandau Jaya adalah ::

1. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas kepala Desa memiliki fungsi fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban ,melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

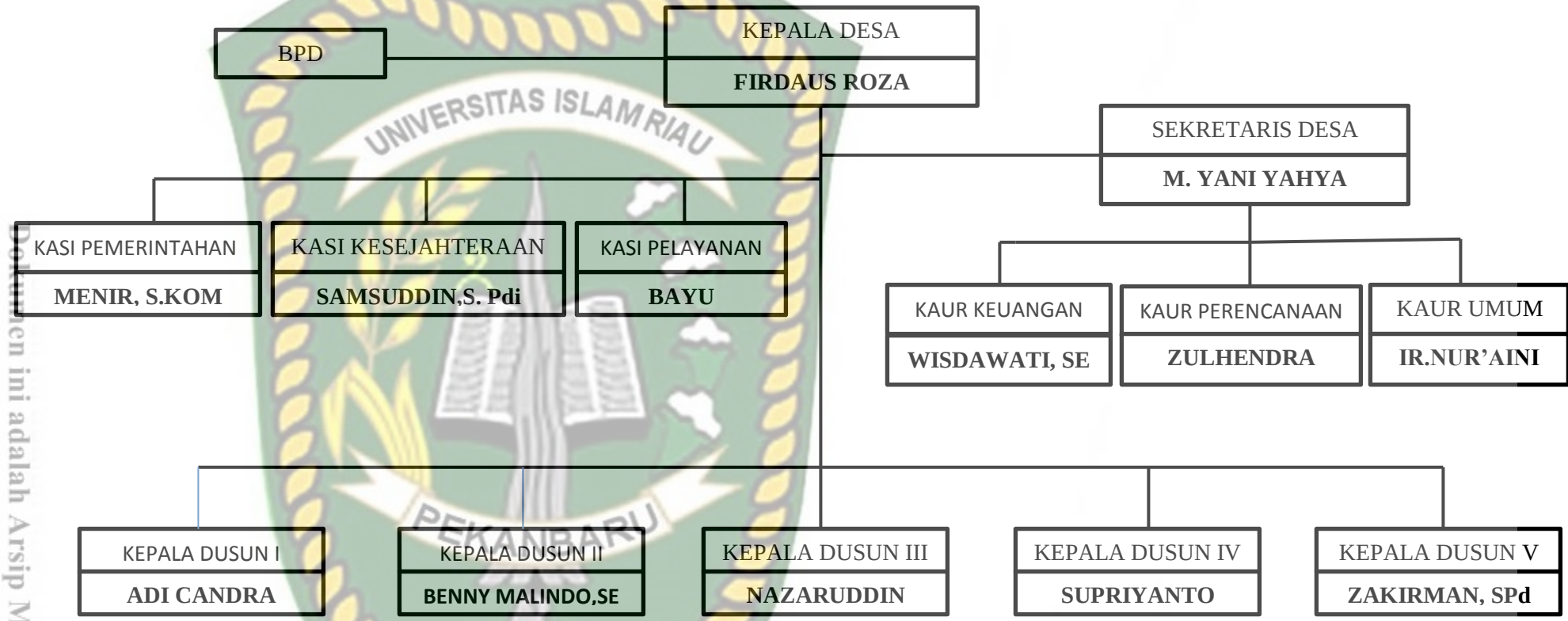
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Gambar II. 1: Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pandau Jaya



Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Kepala Seksi

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b. Kepala seksi kesejahteraan, mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun tugas Kepala kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sementara itu, untuk melihat Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pandau Jaya dapat kita lihat dari tabel berikut ini:

Tabel III. 7: Jumlah BPD Desa Pandau Jaya

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Sekretaris	1
4	Anggota	6
Jumlah		9

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Berikut fungsi, wewenang dan hak BPD berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55, 61, 62, dan 63:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Badan Permusyawaratan Desa berhak :

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa.
b. Mengajukan pertanyaan.
c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat.
d. Memilih dan dipilih.
e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Key Informan dan Informan

Sebelum membahas lebih jauh pada BAB V, maka perlu terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap, responden tersebut terdiri dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kampar, Camat Siak Hulu, Kepala Desa Lubuk Bendahara, Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya, Tim Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya, dan Tokoh Masyarakat Desa Pandau Jaya.

Identitas responden ini guna mendapatkan informasi yang lebih aktual dalam menunjang hasil penelitian ini berupa tingkat umur, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.

1. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dengan responden dan data yang didapat dari kantor Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati umur responden sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV. 1: Identitas Responden dilihat dari Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	21-30	0	0 %
2	31-40	1	8,34 %
3	41-50	5	41,66 %
4	51-60 keatas	6	50 %
Jumlah		12	100 %

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa informan yang terbanyak adalah berumur 51 tahun keatas yaitu sebanyak 50 %, kemudian di ikuti informan berumur tahun 41-50 sebanyak 41,66 %, selanjutnya informan berumur 31-40 tahun sebanyak 8,34 %. Maka dapat disimpulkan bahwa usia informan yang terbanyak termasuk kedalam usia yang mempunyai tingkat pemikiran yang matang.

2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan responden dan data yang didapat dari kantor Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati tingkat pendidikan responden sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV. 2: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	SD	-	-
2	SLTP/Sederajat	-	-
3	SLTA/Sederajat	4	33,34%
4	S1	5	41,66%
5	S2	3	25%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan yang tamatan SD dan SLTP/Sederajattidak tidak ada. Tamatan SLTA/Sederajat sebanyak 4 orang atau 33,34 %, tamatan S1 sebanyak 5 orang atau 41,66%, dan a tamatan S2 berjumlah 3 orang atau 25 %. Dilihat dari tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini, penelti punya keyakinan bahwa informan dapat memberikan informasi yang objektif sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

3. Identias Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara dengan informan dan data yang didapat dari kantor Desa Pandau Jaya dimana penulis melakukan penelitian ini, maka didapati jenis kelamin responden sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel IV. 3: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	10	83,33 %
2	Perempuan	2	16,67 %
Jumlah		9	100 %

Sumber: Data Olahan Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa informan terbanyak menurut jenis kelamin adalah laki-laki yaitu sebanyak 83,33 %, sedangkan responden yang jenis kelamin perempuan sebanyak 16,67 %.

Sehingga jika melihat identitas key informan dan informan yang telah penulis jabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini. Disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023 dimana penulis melakukan penelian in,i serta mereka bisa bekerja sama dalam menyelesaikan hasil penelian ini.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk dapat menganalisa dan memahami tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023, maka penulis menetapkan Kepala Desa Pandau Jaya sebagai key informan. Sedangkan yang dijadikan sebagai informan adalah Kasman Simamora (Ketua BPD Pandau Jaya periode 2014 – 2020), dan 10 Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya yaitu M. Yani Yahya, Ketua Tim/Sekdes, Zulkifli Sekretaris Tim/Ketua LPM periode 2014 -2019, Ir. Nur'aini Anggota/Kaur Keuangan, Munir S.Kom Anggota/Kaur Pemerintahan, Syafrul Rajab, SE,M.Si Anggota /Tokoh Masyarakat, Yendri Nazir S.Sos, M.Si Anggota/Tokoh Masyarakat, Moh. Hujani S.Pd Anggota/Tokoh Pendidikan, Haryanto SKM Anggota/Tokoh Kesehatan, Dasmiarni Anggota/Unsur Perempuan, Benny Malindo SE Anggota/Tokoh Pemuda.

Dalam menganalisis dan menilai Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 , maka penulis menggunakan beberapa indikator yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat (3) yaitu, Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, Pengkajian keadaan desa,Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, Penetapan RPJM Desa. Dan jangka waktu RPJM Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

huruf (a) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

Dari seluruh indikator penelitian diatas maka diperoleh jawabannya berdasarkan wawancara bebas terpimpin dengan informan. Sehingga didapati apakah indikator tersebut mampu memberikan jawaban-jawaban atas masalah dalam Mengvaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023.

Berikut penulis akan memaparkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan wawancara bebas terpimpin dengan informan yang telah ditetapkan dan dianalisa dalam melakukan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan key informan dan informan dari tanggal 13 Septemberl sampai 24 September 2021.

B 1. 1 Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Untuk menjelaskan hasil dan pembahasan pada penelitian ini, data-datanya diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin kepada setiap informan yang dijadikan sumber penelitian atau *key informan* yang menurut penulis mampu memberikan informasi yang terpenting berhubungan dengan tujuan penelitian. Selain dari itu data juga didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Dalam pembahasan ini penulis memfokuskan pada pasal 7 ayat (3) serta pasal 4 ayat (1)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

a. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat 3 huruf (a) mengatakan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Untuk dapat mengetahui bagaimana Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya tersebut, berikut penulis jabarkan hasil wawancara penulis dengan key informan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Firdaus Roza Kepala Desa Pandau Jaya pada hari Senin, 13 September 2021 bertempat di Kantor Desa, terkait dengan pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, beliau mengatakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 telah dibentuk Tim Penyusun RPJMDes Pandau Jaya Tahun 2017 – 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Nomor 08/PEM/PJ/I/2018. Keterangan Kepala Desa ini dibenarkan oleh Bapak M Yani Yahya selaku Seketraris Desa Pandau Jaya (hasil wawancara, Senin 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

Selanjutnya tentang siapa yang menjadi Pembina Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Semua informan yang diwawancarai memberikan jawaban yang sama yaitu Bapak Kepala Desa. Terkait

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan hal ini peneliti telah melakukan wawancara mendalam dengan Bapak Firdaus Roza pada hari Senin tanggal 13 September 2021, di Kantor Desa Pandau Jaya. Dari hasil wawancara tersebut beliau mengatakan bahwa yang menjadi Pembina Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya adalah beliau sendiri, karena ini sudah menjadi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi untuk Pembina Tim Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya 2017 -2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.

Kemudian untuk pertanyaan siapa yang menjadi Ketua Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Maka berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya, beliau mengatakan bahwa yang menjadi Ketua Tim Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya adalah beliau sendiri, karena secara exopisio Jabatan Ketua Tim tersebut dijabat oleh Sekretaris Desa (wawancara, Senin 13 September 2021, jam 10.30 WIB, kantor desa Pandau Jaya). Untuk jabatan Ketua Tim Penyusunan RPJMDes juga sudah sesuai dengan Permendagri tersebut.

Sedangkan untuk pertanyaan siapa yang menjadi Sekretaris Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Semua informan yang peneliti wawancarai menjawab Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pandau Jaya yaitu Zulkifli. Berikut hasil wawancara Penulis dengan Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya yakni Bapak Zulkifli sebagai berikut: Bahwa beliau memang diangkat oleh Bapak Kepala Desa sebagai Sekretaris Tim Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya. Awalnya Bapak Zulkifli menolak, karena beliau tidak paham dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kegiatan tersebut dan juga tidak bisa computer. Tetapi karena ini amanat dari Permendagri sebagaimana yang di katakana Pak Kades dan bukan beliau yang akan mengetiknya, dan ini hanya formaliatas saja, maka akhirnya Bapak Zulkifli menerima jabatan tersebut (wawancara, Kamis, 16 September 2021, Perumahan Mahang Raya). Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk jabatan Sekretaris Tim Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya juga sudah sesuai dengan Permendagri, walaupun hanya sebagai formalitas saja.

Untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah anggota Tim Penyusunan RPJMDes Pandau Jaya berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya? Berkaitan dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kades, beliau mengatakan bahwa rencananya untuk anggota Tim ini akan mengacu pada Permendagri tersebut. Tetapi setelah memperhatkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh unsur – unsur yang pada saat itu, maka tidak mungkin mengakomodir semua yang ada dalam Permendagri, demi kelancaran dan maksimalnya kerja tim, maka untuk anggota tim tidak semuanya sesuai dengan Permendagri. Sehingga untuk anggota tim berasal dari perangkat desa 3 orang, tokoh masyarakat 2 orang, tokoh pendidikan 1 orang, tokoh kesehatan 1 orang, tokoh pemuda 1 orang dan tokoh perempuan 1 orang. Jadi unsur yang tidak terwakili dalam anggota tim adalah lembaga pemberdayaan masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa (wawancara, Senin, 13 September 2021, kantor desa Pandau Jaya).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara Penulis terhadap Kepala Desa Pandau Jaya diatas maka dapat diketahui bahwa unsur yang terlibat didalam Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa Sebagai Ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris, dan anggota yang terdiri dari Perangkat Desa, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan tokoh pemuda dan tokoh perempuan.syarakat.

Untuk jumlah tim sebagaimana diatur dalaam pasal 8 ayat 3 Permendagri tersebut adalah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa, beliau menjelaskan bahwa RMJMDes Pandau Jaya merupakan dokumen penting yang sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan kebijakan pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. RPJMDes juga sebagai alat control bagi public terhadap pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan kedudukannya secara transparan dan akuntabel. Karena RPJMDes ini harus disusun secara baik, maka kami menetapkan jumlah tim maksimal sebagaimana yang diatur dalam Permendagri yaitu sebanyak 11 (sebelas) orang (wawancara, Senin 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa untuk jumlah tim sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun2014.

Adapun sebelas orang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4: Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pandau Jaya Tahun 2017-2023.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Nama	Jabatan Dalam Tim Penyusun
1	Firdaus Roza	Pembina (Kepala Desa)
2	M. Yani Yahya	Ketua (Sekdes)
3	Zulkifli	Sekretaris (Ketua LPM)
4	Ir. Nur'aini	Anggota (Perangkat Desa)
5	Samsuddin, S.Pdi	Anggota (Perangkat Desa)
6	Munir, S.Kom	Anggota (Perangkat Desa)
7	Yendri Nazir, S.Sos, M.Si	Anggota (Tokoh Masyarakat)
8	Safrul Rajab, SE, MM	Anggota (Tokoh Masyarakat)
9	Haryanto, SKM	Anggota (Tokoh Kesehatan)
10	Moh. Hujani, S.Pd	Anggota (Tokoh Pendidikan)
11	Dasmiarni	Anggota (Tokoh Perempuan)
12	Benni Malindo	Anggota (Tokoh Pemuda)

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa dalam Tim Penyusun RPJMDes Pandau Jaya terdapat dua orang perempuan yaitu satu orang dari perangkat desa dan satu orang lagi dari perwakilan perempuan yaitu Dasmiarni, berarti ini sudah memenuhi ketentuan dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014.

Kemudian berkaitan dengan Surat Keputusan tentang pengangkatan Tim Penyusun RPJMDes Pandau Jaya Tahun 2017 2023, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa dan hasil observasi memang sudah ada Surat Keputusannya, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Nomor 08/PEM/PJ/I/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2023.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara diatas dan diperkuat dengan hasil observasi serta dokumentasi dapat simpulkan bahwa Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya (RPPJMDes) tahun 2017 - 2023 telah dibentuk oleh Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pandau Jaya Nomor 08/PEM/PJ/I/2018, terdiri dari Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa Sebagai Ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris, dan anggota yang terdiri dari 3 (tiga) orang Perangkat Desa, 2 (dua) orang tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh kesehatan, tokoh perempuan dan tokoh pemuda masing – masing 1 (satu) orang. Dalam Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tersebut masih ada yang tidak sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yaitu pasal 7 ayat 2 huruf d yaitu anggota tim berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat lainnya. Sedangkan untuk anggota tim Penyusu RPJMDes Pandau Jaya tidak ada anggota yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa.

b. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 7 ayat 3 huruf (b) mengatakan bahwa salah satu kegiatan dalam penyusunan RPJM Desa adalah penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk menilai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, berikut peneliti uraikan hasil wawancara dengan key informan dan informan, serta hasil observasi dan dokumentasi.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam penyusunan RPJM Desa adalah penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan ini, maka berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim, beliau mengatakan bahwa tim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelaraskan RPJM Desa Pandau Jaya dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar, dengan cara mempelajari dan mempedomani Rencana Pembanmgunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022, kemudian diselaraskan dengan RPJM Desa Pandau Jaya (Wawancara, Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya). Hal senada juga disampaikan oleh anggota tim yang lain dari unsur tokoh masyarakat yaitu Bapak Safrul Rajab, menurut beliau bahwa tim sudah melakukan peyelarasan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten Kampar yang terdapat dalam RPJM Daerah Kabupatn Kampar Tahun 2017 -2022, karena RPJM Desa merupakan landasan bagi penyusunan usulan program desa yang akan dibiayai oleh APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, (Wawancara, Senin, 20 September 2021, Dusun 2 Pandau Permai).

Berdasarkani hasil wawancara peneliti dengan informan tersebut diatas, dan dari dokumen yang peneliti lihat dapat disimpulkan bahwa Tim Penyusun

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

RPJM Desa Pandau Jaya telah melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kampar sebagaimana yang termuat dalam RMJMD Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022. RPJM Desa Pandau Jaya ini diharapkan mampu memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatuf, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya didalam satu pola sikap dan pola tidak.

Kemudian terkait dengan informasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar yang berasal dari rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, anggota tim dari tokoh pendidikan yaitu Bapak Moh. Hujani mengatakan bahwa Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya tidak mendapatkan informasi terkait dengan Renstra tersebut, karena pada saat RPJM Desa Pandau Jaya ini disusun Renstra dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang kami butuhkan belum ada yang siap (Wawancara, Kamis, 16 September 2021, SMP 4 Siak Hulu). Demikian juga pendapat yang disampaikan Bapak Munir, anggota tim dari perangkat desa, dalam menyusun RPJM Desa Pandau Jaya memang tidak ada mempedomani Renstra dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar, karena pada waktu itu renstranya masih belum siap, sehingga tim juga tidak tahu program dari masing – masing satuan kerja perangkat daerah tersebut yang masuk ke desa Pandau Jaya (Wawancara, Selasa, 14 September 2021, Kanor Desa Pandau Jaya).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari hasil wawancara Peneliti dengan kedua informan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya 2017 – 2023 tidak bisa mengacu dan mempedomani rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar, karena pada saat penyusunan RPJM Desa, Renstra dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang dibutuhkan tim beluam ada yang selesai. Sehingga tim tidak mengetahui program kegiatan satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar yang masuk ke desa Pandau Jaya, dan ini bisa mengakibatkan tumpang tindihnya atau tidak singkronnya RPJM Desa Pandau Jaya dengan Renstra satuan kerja perangkat daerah tersebut.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang keselarasan RPJM Desa Pandau Jaya dengan Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten Kampar. Melalui wawancara peneliti dengan Ibu Ir. Nur'aini anggota tim dari perangkat desa mengatakan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya tidak bisa mengacu dan mempedomani Rencana Umum dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah kabupaten Kampar, karena pada waktu penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2022 Kabupaten Kampar belum lagi memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Wawancara, Selasa, 14 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya). Demikian juga pendapat Bapak Heriyanto sebagai anggota tim yang juga bekerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, menurut beliau pada saat penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya memang belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar, peraturan daerah tentang ini baru ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu Peraturan Daerah Kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kampar Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2019 – 2039 (Wawancara, Selasa, 21 September 2021, Dusun 1 Pandau Makmur).

Berdasarkan penjelasan dari kedua informan tersebut dan dari dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya, tim tidak bisa menyelaraskan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten Kampar, karena pada saat penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya belum ada Peraturan Daearah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sehingga untuk tahapan kegiatan ini tidak sesuai dengan yang diatur dalam pasal 10 ayat 4 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Tahapan berikutnya dalam penyusunan RPJM Desa adalah melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 4 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Untuk tahapan ini, Bapak Heriyanto menjelaskan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau Jaya telah melakukan penyelarasan dengan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten Kampar sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar 2017 – 2022 (Wawancara, Selasa, 21 September 2021, Dusun 1 Pandau Makmur). Dari penjelasan Bapak Heriyanto ini dan didukung dengan dokumentasi yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau Jaya telah melakukan penyelarsan dengan rencana pembangunan kawasan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perdesaan kabupaten Kampar yaitu dengan cara mempedomani RPJM Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 – 2022. Berarti untuk tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dikemukakan diatas.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahawa tidak semua arah kebijakan pembangunan kabupaten Kampar bisa diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya. Arah kebijakan pembangunan yang bisa diselaraskan adalah dengan RPJMD Kabuaten Kampar dan rencana pembangunan kawasan perdesaan kabupaten Kampar. Sedangkan yang tidak bisa diselaraskan oleh tim adalah dengan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar dan rencana umum serta rinci tata ruang wilayah kabupaten Kampar, karena pada saat dilakukan penyusunan RPJM Desa dokumen yang berkaitan dengan itu belum ada.

c. Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa adalah salah satu tahapan dalam menyusun RPJM Desa sebagaimana diatur dalam paragraf ke 4 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pengkajian keadaan desa ini dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi desa secara objektif. Pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan penyelarasan data desa, penggalian gagasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka pentusunan perencanaan pembangunan desa. Untuk mengetahui tentang pengkajian keadaan desa ini, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa orang informan penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak YN anggota tim dari tokoh masyarakat, beliau menjelaskan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau Jaya telah melakukan pengkajian keadaan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014. Pengkajian keadaa desa dilakukan dengan cara penyelarasan data desa melalui kegiatan pengambilan data dari dokumen data desa dan membandingkan data desa dengan kondisi desa saat itu. Data desa tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di desa Pandau Jaya. Kemudian hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa (Wawancara, Senin, 20 September 2021, Kantor BPD Pandau Jaya).

Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa dan masalah yang dihadapi desa. Kemudian hasil penggalian gagasan masyarakat ini, menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan, yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggalian gagasan tersebut dilakukan secara partisipatif menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), dan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi. Pelibatan masyarakat desa dilakukan melalui musyawarah dusun yang didampingi tim penyusun RPJM Desa (Wawancara dengan Bapak YN, Senin, 20 September 2021, Kantor BPD Pandau Jaya).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penggalian gagasan masyarakat dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah, yaitu dengan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, PKK Desa, LPM Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna, LINMAS Desa dan Pengurus Masjid/Mushalla. Diskusi kelompok dilakukan dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa sebagai alat kerja untuk menggali aspirasi masyarakat. Setelah itu tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan usulan rencana kegiatan dari masyarakat tersebut. Hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa. Kemudian tim menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara dan melaporkan kepada Kepala Desa. Dari wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau Jaya memang telah menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa tersebut kepada Kepala Desa, dan laporan tersebut juga sudah disampaikan Bapak Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa (Wawancara, Senin, 13 September 2021, Kantor Kepala Desa Pandau Jaya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dasmiarni anggota tim perwakian perempuan, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 di Dusun 5 Sei Tangon dan Bapak Benny Malindo perwakilan pemuda pada hari itu juga di Dusun 2 Pandau Permai, keduanya mengatakan bahwa tim penyusun RPJM Desa Pandau Jaya memang telah melakukan pengkajian keadaan desa sesuai dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014. Sebagai anggota tim, kedua informan tersebut ikut memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam pertemuan ditingkat kelompok dan dusun untuk menemukan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, serta menemukan peluang pendayagunaan sumber daya desa.

Dari hasil wawancara peneliti tersebut dan dari dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya dalam melakukan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa yaitu dengan mengadakan diskusi kelompok dan musyawarah dusun. Kemudian Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dan hasil rekapitulasi dituangkan dalam format usulan rencana yang menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa. Selanjutnya tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan desa yang dituangkan dalam berita acara, dan melaporkan kepada kepala desa. Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui Musyawarah Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam menyusun RPJM Desa Pandau Jaya pada tahapan pengkajian keadaan desa, tim sudah melaksanakannya sesuai dengan paragraf ke 4, pasal 12 sampai pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa (MUSDES) adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemrintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal - hal yang bersifat strategis. Musyawarah Desa ini merupakan langkah awal penyusunan program desa dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Musyawarah Desa merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyusunan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam paragraf 5 Permendagri nomor 114 tahun 2014. Untuk mengetahui apakah dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya ada atau tidak dilakukan Musyawarah Desa, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan informan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kasman Simamora, SH, MH, Ketua BPD Pandau Jaya Perode 2015 – 2020 menjelaskan, bahwa dalam rangka penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya tahun 2017 – 2023 BPD Pandau Jaya telah melaksanan Musyawarah Desa sebagaimana yang diatur dalam paragraf 5, pasal 20 sampai pasal 22 Permendagri nomor 114 tahun 2014. Musyawarah Desa ini telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2018 yang bertempat di Aula Kantor Desa Pandau Jaya, yaitu setelah BPD menerima laporan pengkajian keadaan desa dari Kepala Desa (Wawancara, Jum'at, 24 September 2021, Dusun 5 Sungai Tangon).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lebih lanjut Bapak Kasman Simamora mengatakan, hal – hal yang dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa tersebut adalah laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa, dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun yang dibahas berkaitan dengan laporan keadaan desa adalah daftar masalah dan potensi dari sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa. Sedangkan pembahasan arah kebijakan pembangunan desa berkaitan dengan pengelolaan pendapatan desa, pengelolaan belanja desa dan kebijakan umum anggaran. Pembahasan berikutnya adalah bidang : sarana prasarana fisik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama, pemerintahan, kesehatan, kelembagaan, kamtibmas, lingkungan hidup, partisipasi masyarakat, pertanian, peternakan, perikanan, hukum, pertanahan dan perindustrian perdagangan.

Menurut Bapak Kasman Simamora SH, MH, Musyawarah Desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diskusi kelompok membahas : laporan hasil pengkajian keadaan desa, prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa, dan rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. Output dari musyawarah desa ini yaitu hasil kesepakatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa Pandau Jaya dalam menyusun RPJM Desa.

Berdasarkan penjelasan informan tersebut dan dari dokumen yang ada, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya, Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya telah melakukan musyawarah desa sesuai dengan paragraf 5 pasal 20 sampai pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hasil kesepakatan dari musyawarah desa tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan akan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa..

e. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Mengacu pada indikator yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini dan sesuai dengan paragraf ke 6 pasal 23 dan 24 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, tahapan selanjutnya adalah penyusunan RPJM Desa. Untuk mengetahui proses penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui proses penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya sebagai Ketua Tim (Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya), menurut beliau rancangan RPJM Desa Pandau Jayaandau Jaya disusun berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dalam musyawarah desa tentang Penyusunan Rencana Pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa yang telah dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa Pandau Jaya. Selanjutnya tim membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak M. Yani Yahya sebagai Ketua Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya tersebut dapat disimpulkan bahwa Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya telah menyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dalam musyawarah desa tentang Penyusunan Rencana Pemabngunan Desa, kemudian dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Selanjutnya tim membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dengan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa.

Setelah Kepala Desa menerima berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dari tim, berdasarkan pasal 24 Permendagri nomor 114 tahun 2014, yang harus dilakukan Kepala adalah Desa memeriksa dokumen tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa diketahui bahwa Kepala Desa telah memeriksa dokumen Rancangan RPJM Desa Pandau Jaya yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya, kemudian dokumen tersebut dijadikan bahan untuk melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Firdaus Roza, Kepala Desa Pandau Jaya, Senin, 21 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari penjelasan tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pandau Jaya setelah menerima berita acara dari Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah memeriksa dokumen Rancangan RPJM Desa dari tim tersebut. Selanjutnya dokumen Rancangan RPJM Desa yang telah selesai diperiksa Kepala Desa dijadikan bahan untuk melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Dari penjelasan informan diatas dan dari dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwa proses Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya 2017 – 2023 telah sesuai dengan paragraf ke 6 pasal 22 dan 23 Permendagri nomor 114 tahun 2014. Dalam Rancangan RPJM Desa tersebut telah memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa paragraf ke 7 menyebutkan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Untuk dapat mengetahui tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desa Pandau Jaya tersebut, berikut di jabarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yang telah di tentukan.

Dari hasil wawancara dengan semua informan dan key informan terkait dengan ada atau tidaknya dilakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tentang Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya, semuanya mengatakan ada dilakukan Musrenbangdes. Lebih lanjut Bapak Kepala Desa menjelaskan, Musrenbangdes tentang Penyusunan RPJM Desa telah dilaksanakan Kepala Desa pada tanggal 23 Maret 2018 yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, Ketua LPM, Ketua PKK, Ketua RW, Ketua RT, dan unsur masyarakat serta Tim Penyusun RPJM Desa. Pada Musrenbangdes itu telah dibahas dan disepakati Rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara (Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

Dari penjelasan informan dan key informan diatas serta didukung dengan dokumen yang ada dapat disimpulkan bahwa didalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pandau Jaya telah sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Hal ini dapat dilihat bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pandau Jaya telah di ikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Dalam Musrenbangdes itu juga telah dibahas dan disepakati Rancangan RPJM Desa Pandau Jaya yang dituangkan dalam berita acara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

g. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Salah satu tahapan dalm penyusunan RPJM Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Untuk melihat tahapan ini di Desa Pandau Jaya, maka penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informa yang telah peneliti tetapkan sebagai berikut.

Melalui wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pandau Jaya diketahui bahwa Kepala Desa ada mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk dijadikan lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa Pandau Jaya. Kemudian menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. (Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Pandau Jaya diatas, terlihat bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Kepala Desa Pandau Jaya telah mengarahkan tim penyusun RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa dan telah dijadikan lampiran rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa Pandau Jaya. Setelah itu baru menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya (Ketua Tim), beliau mengatakan bahwa Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya adalah untuk menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJM Desa Pandau Jaya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa Pandau Jaya disusun oleh Pemerintah Desa bersama Tim Penyusun RPJM Desa (Senin, 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

Setelah itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Kasman Simamora, SH, MH (Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandau Jaya 2015 2020), beliau menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2017 – 2023 telah di bahas dan sepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 23 Maret 2018 (Jum'at, 24 September 2021, Dusun 5 Sungai Tangon).

Dari penjelasan informan diatas, beserta dokumen yang peneliti lihat dapat disimpulkan bahwa didalam Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya telah melakukan perbaikan dokumen rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa seperti arahan dari Kepala Desa. Kemudian Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Permusyawaratan Desa dan telah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2023 pada tanggal 27 Maret 2018. Ini menunjukkan bahwa dalam Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa paragraf ke 8 pasal 27.

Dari hasil wawancara peneliti dengan key informan dan semua informan, serta berdasarkan dokumen yang ada dan hasil obseravsi, dapat diketahui bahwa dalam Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2023 pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam melakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya tahapan yang sudah dilaksanakan sebahagian besar sudah sesuai dengan Permendagri tersebut, yaitu pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, Pengkajian Keadaan Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, Penyusunan Rancnagan RPJM Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musywarah Rencana Pembangunan Desa dan Penetapan RPJM Desa. Sedangkan yang belum sesuai dengan Permendagri tersebut adalah tentang Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kampar yang meliputi rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Kampar. Penyebab tim tidak bisa melakukan penyelarasan pada waktu itu karena belum adanya dokumen yang dimiliki satuan kerja perangkat daerah terkait dengan renstra dan belum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kampar.

B. 1. 2 Faktor Penghambat Dalam Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya

Setelah peneliti melakukan penelitian maka dijumpai beberapa faktor penghambat dalam Penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 – 2023 sebagai berikut :

1. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa salah satu faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa adalah tidak adanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Kepala Desa yang baru dilantik atau kepada perangkat desa terkait dengan penyusunan RPJM Desa, sehingga Kepala Desa beserta perangkat tidak punya pengetahuan tentang penyusunan RPJM Desa. Untuk menyusun RPJM Desa Kepala Desa dan perangkat desa hanya mengandalkan anggota tim dari tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan (Wawancara, Senin !3 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya). Demikian juga apa yang disampaikan oleh Bapak M. Yani Yahya selaku Ketua Tim dan Sekretaris Desa, dengan tidak adanya pendidikan dan pelatihan penyusunan RPJM Desa maka sebagai Ketua Tim tidak bisa berbuat banyak dalam penyusunan RPJM Desa (Wawancara, Senin 13 September 2021, Kantor Desa Pandau Jaya).

2. Kurangnya komputer pada saat dilakukan penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya, karena di kantor Desa Pandau Jaya hanya ada 1 (satu) komputer dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1 (satu) printer saja yang masih bisa dipakai. Itupun digunakan untuk melayani masyarakat, tim hanya bisa bekerja diluar jam dinas Pemerintah Desa Pandau Jaya, sehingga waktunya sangat terbatas dan terpaksa bekerja pada malam hari. Berdasarkan informasi dari Bapak Kepala Desa, ketika hari pertama bertugas di kantor Desa Panndau Jaya beliau melihat sarana dan prasarana yang ada dikantor desa memang sangat memprihatinkan sekali, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kekurangan sarana dan prasarana ini sangat berpengaruh pada kinerja tim, terutama dari efisensi waktu. Menurut Bapak Munir S.Kom anggota tim yang diberi tugas untuk mengetik naskah RPJM Desa mengatakan, jika komputer yang ada lebih dari satu maka pengerjaan RPJM Desa ini bisa lebih cepat selesainya.

3. Dalam menyusun RPJM Desa, Pemerintah Desa Pandau Jaya tidak didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, dan ini tidak sesuai dengan pasal 2 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selain itu, Camat Siak Hulu juga tidak ada melakukan koordinasi pendampingan dalam rangka penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya. Akibatnya Tim Penyusun RPJM Desa mengalami kesulitan ketika melakukan penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar, terutama ketika mendata dan memilih rencana program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kampar yang akan masuk ke Desa Pandau Jaya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari tahun 2017 sampai tahun 2023 (Hasil wawancara dengan Bapak Moh. Hujani S.Pd, anggota tim dari tokoh pendidikan, Kamis 16 September 2021, SMP Negeri 4 Siak Hulu).

4. Seluruh Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya memiliki pekerjaan tetap yang cukup menyita waktu, sehingga pengerjaan penyusunan RPJM Desa hanya bisa dilakukan ketika ada waktu luang. Hal ini diketahui setelah peneliti menanyakan kepada Bapak Safrul Rajab, SE, MM dan Bapak Moh. Hujani S.Pd anggota tim dari tokoh masyarakat, beliau mengatakan memang kami akui bahwa kami tidak begitu fokus dalam mengerjakan penyusunan RPJM Desa secara tim, karena aktifitas kami sehari hari adalah sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi dan SMP. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa seluruh Tim Penyusun RPJM Desa Pandau Jaya memiliki kesibukan lain, sehingga tanggung jawab terhadap penyusunan RPJM Desa agak terabaikan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa anggota tim yang betul – betul fokus dalam mengerjakan RPJM Desa Pandau Jaya hanya yang berasal dari perangkat desa dan satu orang lagi dari unsur masyarakat. Sedangkan anggota tim yang lain baru bias hadir ikut bekerja disela – sela waktu luang mereka atau ketika ada undangan rapat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya sehingga ada beberapa item dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 yang tidak bisa dilaksanakan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyusunan RPJM Desa tersebut. Selaian itu karena keterbatasan sarana dan prasarana yang ada serta keterbatasan waktu dari tim, maka penyusunan RPJM Desa baru bisa diselesaikan dengan waktu lebih dari dua bulan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017 - 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2017-2023 masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun yang belum sesuai tersebut adalah tidak ada penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar pada rencana strategis satuan kerja perangkat daerah dan rencana umum serta rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten Kampar, karena pada saat dilakukan dilakukan penyusunan RPJM Desa dokumen tersebut belum selesai dibuat oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten Kampar.

2. Faktor penghambat dalam penyusunan RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017 - 2021 adalah tidak adanya pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan RPJM Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Kepala Desa yang baru dilantik atau kepada perangkat desa, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk penyusunan RPJM Desa, tidak adanya pendampingan yang dilakukan Pemerintah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Daerah Kabupaten Kampar ataupun kooordinasi pendampingan oleh Camat Siak Hulu, dan semua tim penyusun mempunyai pekerjaan tetap yang cukup menyita waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar diharapkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan RPJM Desa kepada Kepala Desa yang baru dilantik dan perangkat desa.
2. Agar Kepala Desa melengkapi sarana dan prasarana kantor, sehingga pekerjaan tidak ada yang terkendala.
3. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melakukan pendampingan kepada desa yang melakukan penyusunan RPJM Desa.
4. Agar Kepala Desa dalam mengangkat tim, juga mempehatikan ketersediaan waktu dari yang akan diangkat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Budiardjo, Miriam, 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Bungin, Burhan, 2009. Penelitian Kualitatif. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Dunn. William. N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press.

Irawan, Soehartono, 2000. Metode Penelitian Sosial. Remaja Rosda Karya. Bandung.

Islamy, Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Johara T, Jayadinata, 1999. Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Institut Teknologi Bandung. Bandung.

Kaloh, J, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan (Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya). PT. Raja Geafindo Persada. Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ndraha, Talizindhu, 2003. Kybernology II(Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta. Jakarta

Ndraha, Talizindhu, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Ndraha, Talizindhu, 2011. Kybernology I(Ilmu Pemerintahan Baru). Rineka Cipta. Jakarta.

Nugroho, Riant, 2004. Formulasi, Implementasi,, dan Evaluasi Kebijakan Publik. Rineka Cipta. Jakarta.

Sitepu, Anthonius, 2012. Teori-Teori Politik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sitory, Djam'an dan Aan Komariah, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Sumpeno, Wahjudin, 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian). CSR Indonesia. Jakarta.

Surbakti, Ramlan, 1999. Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2010. Ilmu Politik. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Wibawa, Samodra, 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Widjaja, Haw, 2011. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Budi, 2007. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). PT. Buku Kita. Jakarta.

Winarno, Budi, 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS. Jakarta.

Dokumen:

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

-Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 - Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

-Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisai Tata Kerja Pemerintah Desa

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :